

## Pengaturan Air di Kawasan Simaretong Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan

Iswar Pangaloan Harahap, Angelia Utari Harahap<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Graha Nusantara Kampus I Tor  
Simarsayang Padangsidempuan  
Email : angeliaharahap@yahoo.co.id

### Abstrak

Diperlukan model kelembagaan yang lahir dari kearifan lokal masyarakat dalam menjaga hutan dan air sekitar sebagai upaya pelestarian lingkungan berkelanjutan agar ekosistem tetap terpelihara sehingga keberlangsungan sistem usaha tani terpadu dapat dipertahankan yang pada akhirnya pengaturan air bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif selama 1 bulan dari bulan Februari-Maret 2018. Hasil pembahasan penelitian ini adalah aturan pengelolaan Penyusunan dan perbaikan aturan yang berlaku saat ini didasari oleh musyawarah dari seluruh masyarakat yang dipimpin para *hatobangon* (tetua) desa, petugas pengaturan air menunjuk satu orang *mantri bondar* (pemimpin dalam pengaturan air) yang membawahi 8 orang pengurus tali air (*jaga bondar*) dalam pengelolaan sistem irigasi, dan imbalan pengaturan air berasal dari semacam iuran jasa pemanfaatan air yang diberikan setiap warga pengguna air.

**Kata Kunci** : Pengaturan, Air, Petugas, Imbalan, Marancar

### Abstract

*An institutional model that is born from the local wisdom of the community in protecting the surrounding forest and water is needed as an effort to preserve the environment so that the ecosystem is maintained so that the sustainability of the integrated farming system can be maintained which ultimately aims to improve the welfare of the community. The research method is a case study method with a descriptive qualitative approach for 1 (one) month from February to March 2018. The results of the discussion of this study are the management rules for the preparation and improvement of prevailing rules based on deliberations from all communities led by village hatobangon (elders), Water management officials appoint one bondar (leader in water management) who oversees 8 water rope administrators (guard) in the management of irrigation systems, and compensation for regulating water comes from a kind of water utilization service fee provided by each water user.*

**Keyword** : Arrangement, Water, Officers, Rewards, Marancar

### Pendahuluan

Pembangunan sistem pengairan di komunitas Simaretong sudah dilakukan sebelum terbentuknya kampung secara resmi atau sebelum 1907, tahun dimana desa induk dari keempat desa saat ini resmi didirikan. Pengukuhan perkampungan ini diberikan oleh raja adat Marancar yang juga memberikan nama Simaretong sebagai nama perkampungan tersebut. Nama tersebut berasal dari penyebutan raja adat Marancar pada komunitas ini yang mampu membuka lahan yang diberikan kepada mereka dengan cepat dan terkesan tidak terhitung. Masyarakat juga membangun saluran irigasi sederhana sepanjang 6 km dan pintu-pintu pembagian air untuk mengantarkan irigasi dan air bersih ke blok persawahan dan

pemukiman. membangun infrastruktur di desanya, masyarakat harus dilibatkan sedari awal.

Sebagai upaya mendukung perlindungan saluran irigasi ini, secara adat masyarakat telah menetapkan hutan seluas kurang lebih 3.000 hektar, yang merupakan tangkapan utama dari sumber air saluran ini, sebagai hutan lindung adatnya. Merasa tak cukup hanya menetapkannya secara adat, pada 1994 dengan sebuah kesadaran agar memiliki kekuatan hukum formal, masyarakat 4 lokasi desa penelitian menuangkan kesepakatan yang telah berjalan ini ke dalam sebuah surat pernyataan. Surat ini ditandatangani oleh pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh agama. Petugas kehutanan adat (*mantri bondar*) ditunjuk untuk mengawasi pemanfaatan hutan. Bagi pengguna yang melanggar aturan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan adat dan tingkat kepatuhannya tinggi karena aturan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dalam kerapatan adat dan diawasi pelaksanaannya oleh *hatobangon* pada komunitas masing-masing.

## Metode Penelitian

### Tempat dan Waktu Penelitian

Dilaksanakan di Desa Tanjung Rompa, Desa Haunatas, Desa Siranap, dan Desa Tanjung Dolok di Kawasan Simaretung, Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mulai bulan Februari - Maret 2018.

### Metode Penelitian

Menggunakan metode studi kasus mengenai pengaturan air dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Parameter yang diamati adalah aturan pengelolaan, petugas pengaturan air, dan imbalan petugas pengairan.

## Hasil Dan Pembahasan

### Aturan Pengelolaan

Dalam pengelolaan sistem irigasi dan air bersih serta perlindungan hutan sumber airnya, komunitas Simaretung membuat sejumlah aturan/kelembagaan. Aturan ini sudah mulai dibangun dan diterapkan sejak pertama kali kampung ini didirikan. Penyusunan dan perbaikan aturan yang berlaku saat ini didasari oleh musyawarah dari seluruh masyarakat yang dipimpin para *hatobangon* (tetua) desa. Pada aturan ini ditetapkan bahwa yang berhak mendapatkan pembagian air irigasi adalah warga keturunan keempat desa tersebut yang memiliki areal persawahan di kawasan persawahan yang ada dan telah di adati pada waktu pernikahannya. Khusus bagi mereka yang ingin menjadi anggota dan memperoleh hak menggunakan air, diwajibkan membayar biaya awal keanggotaan berupa 12 kg karet dan 3 tabung padi, yang digunakan untuk membeli perlengkapan para pengurus tali air. Sebaliknya, jika si pemegang hak kemudian pindah dan bermukim di luar wilayah keempat desa tersebut, maka ia akan kehilangan haknya menggunakan air. Tapi hak tersebut bisa diperoleh lagi jika ia kembali bermukim di wilayah keempat desa tersebut. Demikian halnya dalam menjaga keberlangsungan aliran dan kebersihannya, ditetapkan hukuman barang siapa dengan sengaja menutup saluran utama atau mengotori termasuk buang air besar pada saluran primer dan skunder akan dihukum dengan denda satu ekor kerbau.

### **Petugas Pengaturan Air**

Komunitas Simaretong menunjuk satu orang *mantri bondar* (pemimpin dalam pengaturan air) yang membawahi 8 orang pengurus tali air (*jaga bondar*) dalam pengelolaan sistem irigasi. Kelompok pengelolaan air ini merupakan sebuah institusi otonom yang berada di dalam koordinasi keempat pemerintah desa yang ada. Pemilihan para pengurus kelompok pengelolaan air ini dilakukan secara musyawarah oleh seluruh anggotanya dan tidak memiliki periode waktu tertentu. Jika beberapa anggota melihat ada petugas dalam kelompok pengelola air yang kurang dapat melakukan fungsinya dengan baik, maka dapat diajukan penghentian dan pengangkatan petugas baru kepada *hatobangon* desa. Para petugas inilah yang mengelola pengaturan air, menjaga saluran yang ada dan mengawasi hutan di areal perlindungan masyarakat. Jika terjadi kerusakan pada tali air atau saluran air, para petugas akan memperbaiki kerusakan yang ada. Namun untuk kerusakan berat—jika tidak mampu diperbaiki oleh pengurus tali air atau dibutuhkan kerja yang melebihi dari satu minggu— maka *mantri bondar* akan meminta masyarakat yang lain untuk membantu secara bergotong royong. *Jaga bondar* pula yang menertibkan pembagian air dengan menata saluran (parit) distribusi agar tidak terjadi pelanggaran jalur pembagian yang telah ditetapkan. Perhitungan pembagian air didasari oleh perhitungan matematis dengan membagi total air yang ada dengan jumlah pihak yang berhak menggunakan air di keempat desa tersebut, hasilnya disebut mereka sebagai satu bagian air. Satu keluarga bisa saja memiliki lebih dari satu bagian air, tergantung luasan sawah dan penggunaannya. Biasanya satu bagian air adalah setara dengan 0.5 Ha. Mesjid, gereja, sekolah dan fasilitas umum juga dipertimbangkan sebagai pengguna air.

Para penggunaan air tidak diperkenankan mengambil air selain dari pintu pembagian yang sudah disiapkan untuknya dan tidak diperkenankan merusak atau mencuri air dari saluran induk yang ada. *Mantri* dan para *jaga bondar* akan menasehati pelaku kecurangan atau pelanggar, namun jika pelanggar tidak mengindahkannya, maka pertemuan adat yang dipimpin oleh *hatobangon* desalah yang akan dihadapi oleh pelanggar. Dalam pertemuan adat ini, biasanya pelanggar akan dinasihati untuk tidak mengulangi perbuatannya dan besar kemungkinannya akan dijatuhi sanksi adat.

### **Imbalan Petugas Pengairan**

*Mantri* dan *jaga bondar* yang ada akan memperoleh imbalan atas layanan yang mereka berikan. Imbalan ini berasal dari semacam iuran jasa pemanfaatan air yang diberikan setiap warga pengguna air. Setiap satu bagian air akan dikenakan iuran sebesar 2 kaleng (kurang lebih 24 kg) padi setiap tanamnya. Selain digunakan untuk memberikan imbalan pada para *mantri* dan *jaga bondar*, iuran yang terkumpul juga dapat dipergunakan untuk merawat saluran yang ada. Pemberian imbalan kepada *mantri* dan *jaga bondar* dilakukan berdasarkan waktu kerja yang dikontribusikan oleh masing-masing orang selama setahun yang telah berlangsung. Hasil rekapitulasi waktu kerja dari setiap orang dikumpulkan berdasarkan catatan operasional yang dimiliki oleh *mantri bondar*. Sebelum melakukan perhitungan besar imbalan para petugas, hasil iuran yang terkumpul terlebih dahulu dikurangi biaya operasional. Baru kemudian nilai ini dibagi dengan jumlah rekapitulasi waktu kerja untuk memperoleh besaran imbalan per hari yang akan diberikan. Dan kemudian, besar imbalan per hari inilah yang dikalikan waktu yang dikontribusikan setiap orangnya untuk menentukan besar imbalan yang mereka terima dalam tahun tersebut.

### Kesimpulan

Pengaturan air melibatkan seluruh masyarakat di kawasan Simaretung dengan tugas yang mengelola pengaturan air, menjaga saluran yang ada dan mengawasi hutan di areal perlindungan masyarakat.

### Saran

Diperlukan upaya pengaturan pengelolaan air yang lebih permanen secara kelembagaan lokal di kawasan Simaretung.

### Daftar Pustaka

- Agus, F., Irawan, I., Suganda, H., Wahyunto, W., Setiyanto, A., & Kundarto, M. (2006). *Environmental multifunctionality of Indonesian agriculture. Paddy Water Environ*, 1-8.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Blignaut, J., & Moolman, C. (2006). *Quantifying the potential of restored natural capital to alleviate poverty and help conserve nature: A case study from South Africa*. *Journal for Nature Conservation*, 14(3-4), 237-248
- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Darusman, Dudung. 1993. *Nilai Ekonomi Air Untuk Pertanian dan Rumahtangga: Studi Kasus di Sekitar Taman nasional Gunung Gede-Pangrango*. Pembenahan Kehutanan Indonesia. Institut Pertanian Bogor.
- Depdikbud, 1993. *Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan dalam Upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Daerah Riau*. Tanjung Pinang.
- Dirjen PMD. 1999. *Pola Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional*. Jakarta.
- Dumairy. 1987. *Ekonomika Sumberdaya Air*. BPFE. Yogyakarta.
- Indrizal dan Hazwan, 1993. *Desa-desa Perbatasan TNKS. Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan Hutan*. PSLH Unand. Padang.
- Mac Kinnon *et al*, 1996. *Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika (Terjemahan)*. GMUP. Yogyakarta.